

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BALI



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) PROVINSI BALI TA 2013

Denpasar, Jumat (6 Juni 2014) – Memenuhi ketentuan Undang-undang, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, BPK RI melaksanakan penyerahan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran (TA) 2013.

LHP atas Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari 3 (tiga) bagian yang tidak terpisahkan yakni:

1. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2013 yang memuat opini;
2. LHP atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2013;
3. LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2013.

Dalam LHP yang diserahkan oleh Ketua BPK RI, Dr. H. Rizal Djalil kepada Ketua DPRD Provinsi Bali, A.A. Ngurah Oka Ratmadi, SH., dan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, **BPK RI menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2013.**

Opini tersebut diberikan mengacu pada Pasal 16 ayat 1 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa LHP yang akan diserahkan oleh BPK RI memuat opini atas Laporan keuangan. Opini yang diberikan oleh BPK RI didasarkan atas:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Paragraf Penjelasan dalam opini WTP atas LKPD Provinsi Bali terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Penatausahaan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) belum tertib.
2. Sistem Pengendalian Intern atas proses penyusunan Laporan Keuangan BLUD Rumah Sakit Indera dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali belum memadai.

Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

Djatu Apriellia (Kasubbag Hukum dan Humas)

Telp : (0361) 229193

Fax : (0361) 229184, 256205

website : www.denpasar.bpk.go.id

e-mail : subbagianhukumdanhumasbali@yahoo.com